

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah bagian terkecil dalam sistem pemerintahan suatu negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengertian bahwa desa dan desa adat atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat dari pengertian tersebut, desa atau yang disebut nama lain merupakan sebuah komunitas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dalam kata lain desa memiliki otonominya sendiri. Otonomi di tingkat desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh provinsi maupun kabupaten atau kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa didasarkan pada asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah (Novianto, 2013 : 240). Walaupun demikian, dalam melaksanakan hak otonomi yang dimiliki, desa tetap harus memperhatikan nilai-nilai tanggung jawab terhadap negara.

Roda pemerintahan di tingkat desa, dijalankan dan dipimpin oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut nama lain. Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan di lingkup desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan terhadap masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih singkatnya, Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat di desa (Hanif, 2011 : 74). Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan yang memiliki kedudukan strategis dengan tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab tersebut terdiri atas urusan tugas pekerjaan yang terbagi menjadi pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab tugas pelayanan terpusat dibawah kuasa Kepala Desa (Debby, 2016 : 5). Seorang Kepala Desa memiliki masa jabatan selama enam tahun. Kepala Desa dipilih melalui proses Pemilihan Umum yang dikenal dengan sebutan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa). Pemilihan Kepala Desa menunjukkan bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang sudah berpolitik secara langsung, yang dibuktikan dengan ikut sertanya masyarakat dalam menyalurkan suaranya pada ajang Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik di desa. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di lingkup desa (Neneng, 2016 : 233). Proses pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat desa yang memenuhi syarat dan dilakukan secara rahasia, jujur, dan adil (Rudiadi, 2017 : 140).

Pemilihan Kepala Desa merupakan arena kontestasi politik demokrasi yang ditandai oleh mobilisasi berbagai sumber daya (modal).

Pemilihan Kepala Desa merupakan pemilihan umum yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan pemilihan umum lainnya, karena terdapat kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih (masyarakat desa) dengan calon pemimpinnya. Pada 19 November 2019 di Kabupaten Kudus telah digelar Pemilihan Kepala Desa serentak yang diikuti 115 desa di Kabupaten Kudus. Pada Pilkades serentak tahun 2019, Desa Prambatan Kidul memiliki tiga kandidat calon Kepala Desa, yaitu : Mohammad Noor, Sutopo Hadi Prasetio (Kepala Desa terpilih), Muhammad Andhi Bakhtiar. Berdasarkan data hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Kudus khususnya Desa Prambatan Kidul pada tahun 2019 menunjukkan bahwa perolehan suara tertinggi di dapat oleh calon Kepala Desa nomor urut 2 (dua), yakni Sutopo Hadi Prasetio sebanyak 2557 (53%). Kemudian disusul calon Kepala Desa nomor urut 1, yaitu Mohammad Noor sebanyak 1249 (26%). Lalu terakhir adalah calon Kepala Desa nomor urut 3, yaitu Muhammad Andhi Bakhtiar sebanyak 1005 (21%) (murianews, 2019).

Tabel 1.1

Pilkades Kecamatan Kaliwungu Tahun 2019

No	Nama Desa	Keterangan	Nomor Urut		
			1	2	3

1	Bakalan Krapyak	Nama Calon	Susanto	Yuliati	
		Perolehan Suara	3319	334	
		Peringkat	1	2	
		Persentase	91%	9%	
2	Prambatan Kidul	Nama Calon	Mohammad Noor	Sutopo Hadi	Muhammad Andi
		Perolehan Suara	1249	2557	1005
		Peringkat	2	1	3
		Persentase	26%	53%	21%
3	Prambatan Lor	Nama Calon	Teguh Budi	Kasmari	Sugiyono
		Perolehan Suara	2678	1026	1857
		Peringkat	1	3	2
		Persentase	48%	18%	33%
4	Garung Kidul	Nama Calon	Muhamma Islakhuddin	Aan Setyawan	
		Perolehan Suara	495	1957	
		Peringkat	2	1	
		Persentase	20%	80%	
5	Setrokalangan	Nama Calon	Hendro Supriyanto	Didik Handono	
		Perolehan Suara	778	978	
		Peringkat	2	1	
		Presentase	44%	56%	

6	Banget	Nama Calon	Rukhayatun	Slamet Widodo	
		Perolehan Suara	566	2053	
		Peringkat	2	1	
		Presentase	22%	78%	
7	Blimbing Kidul	Nama Calon	Waryoto Giyok	Poernomo	
		Perolehan Suara	1218	1847	
		Peringkat	2	1	
		Presentase	40%	60%	
8	Sidorekso	Nama Calon	Mochammad Arifin	Ahmad Mahrus	
		Perolehan Suara	2293	2289	
		Peringkat	1	2	
		Presentase	47,2%	47,1%	
9	Gamong	Nama Calon	Sunardi	Noryanto	Zenudin
		Perolehan Suara	83	1366	957
		Peringkat	3	1	2
		Presentase	3%	57%	40%
10	Kaliwungu	Nama Calon	Masjuri	Kosim	Syafi'i Noor
		Perolehan Suara	162	2467	2624
		Peringkat	3	2	1
		Presentase	3%	46%	49%
11	Kedungdowo	Nama Calon	Ummi Rohanah	Malkan	

		Perolehan Suara	3705	3540	
		Peringkat	1	2	
		Presentase	51%	49%	
12	Papringan	Nama Calon	Amin Budiarto	Triyaningsih	
		Perolehan Suara	3207	525	
		Peringkat	1	2	
		Presentase	86%	14%	
13	Mijen	Nama Calon	Rahmat	Singgih Wahyu	
		Perolehan Suara	3226	3340	
		Peringkat	2	1	
		Presentase	49%	51%	
14	Karangampel	Nama Calon	Suwardi	Supama	Mun Saurip
		Perolehan Suara	1566	2478	79
		Peringkat	2	1	3
		Presentase	38%	60%	2%
15	Garung Lor	Nama Calon	Hariyono	Siti Rofi'ah	
		Perolehan Suara	2055	2717	
		Peringkat	2	1	
		Presentase	43%	57%	

Sumber: <https://www.google.com/amp/s/www.murianews.com/2019/11/20/177044/ini-hasil-lengkap-kades-terpilih-di-pilkades-kudus-2019>.

Data dari tabel diatas memperlihatkan bahwa Sutopo Hadi Prasetio terpilih sebagai Kepala Desa Prambatan Kidul dengan perolehan suara sebesar 2.557 (53%). Portal media online, murianews (2019) menyebut bahwa Sutopo maju dalam ajang Pemilihan Kepala Desa Prambatan Kidul melawan petahana (Muhammad Andhi Bakhtiar) dan seorang calon kepala desa pendatang baru (Mohammad Noor). Hasil perhitungan suara menunjukkan bahwa Muhammad Andhi sebagai calon kepala desa petahana hanya memperoleh suara sebesar 1.005 (21%), terpaut 1.552 dari perolehan suara milik Sutopo. Fakta bahwa Sutopo sebagai calon kepala desa pendatang baru yang tampil melawan calon kepala desa petahana dan berhasil menang dalam ajang Pemilihan Kepala Desa Prambatan Kidul 2019 menjadi menarik dan perlu diteliti. Pertanyaan yang muncul adalah apakah terdapat peran aktor lokal dalam kemenangan Kepala Desa terpilih Desa Prambatan Kidul tersebut, sehingga Sutopo bisa menang melawan kepala desa petahana ?.

Keberhasilan pemilihan lokal, yakni Pemilihan Kepala Desa tentunya tidak terlepas dari aktor lokal yang berperan didalamnya. Pemilihan lokal di Indonesia tidak terlepas dari peran aktor politik informal serta jaringan yang terbentuk. Studi terkait aktor non elektoral informal biasanya merujuk pada pengusaha, patrimonial, organisasi masyarakat, dan tokoh agama (Acidieni, 2019 : 125). Penyebutan terhadap aktor lokal berbeda-beda di tiap daerah. Ada yang menyebut aktor lokal tersebut sebagai *botoh*, *broker*, maupun sebagai *sabet*. Di Desa Prambatan Kidul sendiri, sebutan untuk orang-orang yang mengusung calon dalam ajang Pemilu dan

bertanggungjawab terhadap kemenangan sang calon biasa dipanggil dengan sebutan sabet.

Merujuk pada latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisis peran seorang sabet dalam kemenangan seorang Kepala Desa terkait hubungannya dengan teori modal sosial dalam konteks Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini ditulis dengan judul **Peran Sabet Kepala Desa Terpilih Dalam Pilkades Prambatan Kidul Pada Pilkades Serentak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Tahun 2019.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan permasalahan penelitian, yaitu bagaimana peran *sabet* Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Prambatan Kidul pada Pilkades Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *sabet* Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Prambatan Kidul pada Pilkades Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Untuk memberikan gambaran tentang peran aktor lokal sabet dari Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Prambatan Kidul pada Pilkades Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2019.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah dan wawasan keilmuan mengenai analisis peran aktor lokal sabet dalam Pemilihan Kepala Desa, serta memberikan gambaran kepada dunia akademik untuk pengembangan dimasa yang akan datang.

1.5.1 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan teori modal sosial untuk menjelaskan fenomena modal sosial dalam kemenangan seorang calon dilakukan oleh Cici Safitri (2019) yang berjudul “Pengaruh Modal Sosial dalam Kemenangan Mahyeldi-Hendri pada Pilkada 2018”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Kota Padang. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk modal sosial yang dimiliki Mahyeldi-Hendri serta pemanfaatan modal sosial Mahyeldi-Hendri dalam Pemilihan Kepala Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang pasangan Mahyeldi-Hendri memiliki modal sosial yang cukup besar terbukti dari bentuk-bentuk modal sosial yang dimiliki yaitu : (1) Figur atau keribadian pasangan calon di tengah masyarakat. Dimana Mahyeldi merupakan seorang buya dan mubalig. Sedangkan Hendri

merupakan seorang anak muda yang dikenal dan pandai bergaul. (2) Hubungan dan jaringan keluarga, yang mana Mahyeldi tergabung dalam IKKA dan Hendri memiliki jaringan Majelis Taklim Ar-raudah milik keluarganya. (3) Jabatan yang dimiliki, yang mana Mahyeldi adalah seorang petahana dan Hendri seorang ketua partai. (4) Organisasi sosial dan kelompok sosial, yang mana Mahyeldi tergabung dalam beberapa organisasi sosial diantaranya PSP, ICMI, MES, dan PSP. Sedangkan Hendri juga tergabung dalam organisasi KSB dan yayasan Paku. Kesemua bentuk-bentuk modal sosial tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Mahyeldi-Hendri serta tim sukses untuk menarik suara dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Kota Padang.

Hasil penelusuran penelitian terdahulu lain yang menggunakan pendekatan teori modal sosial untuk menjelaskan fenomena modal sosial dalam kemenangan seorang calon juga dilakukan oleh Muhajirin (2020) yang berjudul “Pemanfaatan Modal Sosial Bahrudin dalam Memenangkan Pemilihan Kepala Desa di Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil temuan penelitian menjelaskan bahwa pemanfaatan modal oleh Kepala Desa terpilih memperlihatkan bahwa hubungan baik yang diciptakan sejak lama dapat menimbulkan adanya hubungan timbal balik yang menciptakan kepercayaan masyarakat desa kepada Kepala Desa yang memenangkan Pilkades. Modal sosial yang dimiliki oleh Kepala Desa pada penelitian ini terdiri dari jaringan, kepercayaan, nilai, moral serta kekuatan yang

memobilisasi bentuk dukungan terhadap Kepala Desa, sehingga calon Kepala Desa tersebut terpilih menjadi Kepala Desa. Fokusnya pada jaringan yang dibentuk oleh aktor (Kepala Desa terpilih), dimana aktor yang merupakan Kepala Desa terpilih selalu terlibat dalam berinteraksi dengan masyarakat sehingga lama kelamaan akan membentuk jaringan sosial bagi aktor.

Penelitian yang dilakukan juga menggunakan teori modal sosial untuk menjelaskan fenomena peran sabet dalam kemenangan seorang Kepala Desa. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pemanfaatan kepopuleran atau modal sosial dari para sabet Kepala Desa terpilih. Peneliti berasumsi bahwa seseorang dapat memenangkan kontestasi politik dengan memanfaatkan modal sosial orang lain untuk memperoleh suara terbanyak dan menang dalam ajang pemilihan tersebut.

1.5.2 Landasan Teori

1. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Pemilihan Kepala Desa dapat disebut sebagai suatu pesta demokrasi yang mana masyarakat desa berpartisipasi menyumbangkan suara untuk memilih pemimpin desa untuk dapat memajukan desa. Aktivitas pemilihan Kepala Desa menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di lingkup desa. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan :

- a. Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten atau Kota.

- b. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan Kepala Desa serentak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pemilihan Kepala Desa merupakan kegiatan penyaluran hak demokrasi yang dimiliki setiap warga negara dalam menentukan pimpinan politik dan pemerintahan untuk mengatur desa. Pemilihan Umum merupakan pesta pemerintah, maka pemilihan umum yang diadakan di tingkat desa (Pemilihan Kepala Desa) adalah pesta rakyat. Pemilihan kepala desa dapat diartikan sebagai bentuk kesempatan untuk menampilkan orang-orang yang dapat melindungi kepentingan warga desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan bentuk demokrasi langsung di lingkup desa (Enah, 2017 : 60). Pemilihan Kepala Desa bagi masyarakat desa merupakan hal yang penting, karena Kepala Desa adalah orang yang akan bertanggungjawab atas apa yang terjadi di desa. Oleh sebab itu, masyarakat desa berharap memiliki pemimpin atau Kepala Desa dengan sikap kepemimpinan yang baik (Iwan, 2013 : 2).

Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan digambarkan sebagai suatu bentuk politik transparan, dimana masyarakat ikut secara langsung dalam jalannya pemilihan dan dapat berpartisipasi (Elis, 2020 : 4). Pemilihan Kepala Desa adalah pesta demokrasi warga desa yang didalamnya kebebasan memilih tetap terjamin. Dalam

pelaksanaannya, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh earga negara yang terdaftar sebagai pemilih (Ngabiyanto, 2006 : 80). Tujuan Pemilihan Kepala Desa adalah untuk melibatkan masyarakat ikut serta dalam menentukan pemimpin mereka sendiri dengan harapan pemimpin terpilih dapat membawa desa ke arah yang lebih baik dan mensejahterakan masyarakat desa (Haris, 2019 : 2).

Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh panitia pemilihan, dimana biayanya diperoleh melalui APB Desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Calon Kepala Desa dengan perolehan suara paling tinggi akan ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih. Ketua panitia pemilihan mengajukan Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah penetapan Kepala Desa terpilih. Setelah menerima laporan panitia pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan nama Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota (Muh Iqra, 2020 : 18).

Bupati/Walikota mengeluarkan keputusan Bupati/Walikota tentang pengesahan Kepala Desa terpilih paling lama tiga puluh hari kerja terhitung setelah diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan dalam

bentuk keputusan Bupati/Walikota. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk (Muh Iqra, 2020 : 18).

2. Teori Modal Sosial

Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa secara individu, seseorang tidak dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Sehingga perlu adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dengan individu lain yang berkepentingan untuk mengatasi masalah yang ada (Rusydi, 2003 : 2). Dalam tulisan berjudul *The Rural School Community Center*, Hanifan menuliskan bahwa modal sosial tidak sama seperti modal dalam arti biasa seperti kekayaan atau uang, tetapi lebih kepada aset atau modal nyata dalam hidup berdampingan dengan masyarakat (Hanifan, 1916 : 130).

Bourdieu dalam bukunya *The Forms of Capital* (1986) mengartikan bahwa modal sosial sebagai keseluruhan sumberdaya, baik aktual maupun potensial berkaitan dengan kepemilikan jaringan atau relasi yang telah terlembaga dan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Modal sosial mengarah pada jaringan sosial yang dimiliki oleh aktor dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. Bourdieu juga menjelaskan bahwa besar modal sosial yang dimiliki oleh individu atau kelompok bergantung pada besar volume modal ekonomi, budaya, dan sosial yang dimiliki setiap orang dalam jaringan hubungannya (Bourdieu, 1986 : 249).

Coleman dalam tulisannya dengan judul *Social Capital in The Creation of Human Capital* (1988) memperkenalkan modal sosial sebagai suatu sarana konseptual untuk memahami orientasi teoritis dari tindakan sosial dengan menghubungkan komponen yang berasal dari perspektif sosiologi dan ekonomi. Menurut Coleman, pengertian modal sosial ditentukan oleh fungsinya, yang pada dasarnya fungsi modal sosial memiliki dua unsur yang sama, yakni modal sosial mencakup keseluruhan aspek dari struktur sosial, dan modal sosial memberi kemudahan untuk melakukan tindakan dalam kerangka struktur sosial tersebut.

Coleman kemudian mengidentifikasi tiga pilar penting dalam modal sosial. Pertama, kewajiban dan harapan yang muncul dari rasa percaya di lingkungan sosial. Kedua, pentingnya kelancaran arus informasi dalam struktur sosial yang mendorong berkembangnya kegiatan masyarakat. Arus informasi yang tidak lancar akan menjadikan seseorang ragu dan tidak berani dalam bertindak. Ketiga, pentingnya keberadaan norma-norma yang disepakati dan dipatuhi disertai kejelasan sanksi. Jika tidak, maka orang akan bertindak atas kemauan sendiri tanpa merasa ada ikatan dengan orang lain.

Dalam bukunya yang lain *Foundation of Social Theory* (1990), Coleman berpendapat bahwa tanpa modal sosial seseorang tidak bisa memperoleh keuntungan material dan tidak bisa mencapai keberhasilan lainnya secara optimal. Sebagaimana modal-modal yang lain, modal sosial tidak selalu memberikan keuntungan dalam segala kondisi. Suatu modal sosial bisa

bermanfaat dan memudahkan seseorang dalam melakukan tindakan pada kondisi tertentu, tetapi pada kondisi yang lain bisa menyebabkan kerugian. Pemikiran Coleman tersebut dapat dijelaskan dalam contoh sebagai berikut. Seseorang dengan modal sosial berupa hubungan baik dengan pemimpin bisa mendapat keuntungan secara material ataupun perlindungan dari pemimpin tersebut. Tetapi bila kemudian kondisinya berubah, modal sosial yang seperti itu justru bisa berbalik merugikan orang tersebut.

Robert Putnam mengartikan modal sosial sebagai ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang dapat memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk memperoleh manfaat bersama (Putnam, 1993 : 36). Putnam menilai modal sosial sebagai seperangkat hubungan horizontal antar individu, artinya modal sosial terdiri atas jaringan keterikatan sosial dengan diatur norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat. Dua hal dasar dari konsep modal sosial menurut Putnam yakni, adanya jaringan hubungan dengan norma-norma terkait, dan keduanya saling mendukung untuk bisa mencapai keberhasilan bagi orang-orang yang berada dalam jaringan tersebut.

Putnam menyimpulkan modal sosial berupa norma-norma, dan jaringan menjadi prasyarat yang diperlukan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik. Alasan pertama, keberadaan jaringan sosial memungkinkan terbentuknya koordinasi dan komunikasi yang menumbuhkan rasa saling percaya antar anggota masyarakat. Kedua, kepercayaan mempunyai implikasi

positif dalam kehidupan bermasyarakat. Keterkaitan orang-orang yang disertai rasa saling percaya dalam suatu jaringan sosial dapat memperkuat norma-norma tentang keharusan untuk saling membantu. Ketiga, keberhasilan-keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada waktu sebelumnya dalam jaringan ini dapat mendorong keberhasilan kerjasama di waktu mendatang. Beberapa elemen penting modal sosial (Thomas, 2020 : 7) :

a. Kepercayaan

Kepercayaan menjadi penting karena ada atau tidaknya sebuah kepercayaan berpengaruh pada apa yang akan dilakukan. Rasa mempercayai yang timbul terhadap seseorang atau lembaga tidak hanya karena janji yang ditawarkan, tetapi karena mengenal watak, pilihan-pilihan dan akibat dari berbagai tindakannya, dasar pengetahuannya dan kemampuannya. Orang-orang yang punya hubungan aktif dan hubungan kepercayaan dengan orang lainnya akan mengembangkan atau memelihara sifat-sifat karakter yang baik untuk anggota masyarakat lainnya.

b. Upaya Kooperatif antar Anggota Organisasi

Di antara para anggota organisasi mulai dari jabatan tertinggi sampai jabatan paling bawah, perlu adanya kesepakatan tentang *rule of the game* dalam organisasi, tentang apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan bersama dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jika kesepakatan bersama dijalankan secara konsisten, maka akan tercipta

suatu iklim yang kondusif bagi pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi yang akan melancarkan produktivitas organisasi.

c. *Mutual Affection*

Banyak sekali transaksi berlangsung hanya karena orang-orang yang terlibat didalamnya saling peduli satu sama lain, mereka secara rasional percaya bahwa semua orang saling peduli untuk melaksanakan kewajiban mereka.

d. Penciptaan Jaringan Sosial

Seseorang mungkin awalnya beranggapan bahwa jaringan merupakan saluran komunikasi untuk melindungi dan mempromosikan hubungan interpersonal. Jaringan ini berupa jaringan yang terajut erat seperti keluarga inti dan bersifat ekstensif. Hubungan dalam jaringan juga dapat diekspresikan dalam bentuk saluran. Keputusan untuk membentuk saluran yang menghubungkan jaringan-jaringan merupakan keputusan kolektif. Jaringan-jaringan yang merupakan modal sosial bertindak sebagai saluran untuk mengalirnya informasi yang berguna memfasilitasi pencapaian tujuan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1. Modal sosial adalah sumber daya dari seseorang untuk memenangkan suatu kontestasi politik berupa Pemilihan Umum. Sumberdaya dalam teori modal sosial memiliki empat unsur utama, yaitu :

- a. Kepercayaan. Artinya, suatu kepercayaan dari masyarakat terhadap sabet yang mengusung calon Kepala Desa memainkan peran penting untuk warga desa pada saat menentukan pilihan siapa yang harus dipilih pada saat hari Pemilihan Umum Kepala Desa tiba. Kepercayaan dari sabet terhadap siapa calon yang akan diusung juga penting sebagai modal untuk mempengaruhi masyarakat untuk ikut percaya dan memilih calon yang diusung.
 - b. Upaya kooperatif antar anggota organisasi. Artinya, terdapat kesepakatan antara sabet dan Kepala Desa yang diusung dalam menentukan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk memenangkan sang calon dalam ajang Pemilu. Calon Kepala Desa bekerjasama dengan sabet agar bisa menjadikannya sebagai pemenang dalam Pemilu tersebut.
 - c. *Mutual Affection*. Artinya, terdapat interaksi antara sabet dengan warga, sabet dengan cakades, dan interaksi antar sabet dalam mencapai tujuan untuk memenangkan calon Kepala Desa yang diusung.
 - d. Penciptaan jaringan sosial. Artinya, terdapat jaringan yang terbentuk dalam upaya pemenangan calon Kepala Desa. Jaringan tersebut berupa sabet yang bertugas di arus bawah untuk menarik suara masyarakat agar memilih Kepala Desa yang diusung.
2. Pilkades adalah proses pemilihan Kepala Desa secara langsung. Untuk melihat bagaimana pemanfaatan teori modal sosial yang dimiliki dapat

memenangkan seorang calon Kepala Desa di dalam proses Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kudus tahun 2019 di Desa Prambatan Kidul .

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menerapkan desain penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data dengan situasi yang terjadi, sikap serta pandangan dalam masyarakat, perselisihan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antara fakta serta pengaruhnya terhadap kondisi tertentu (linguistikid, 2016). Penelitian deskriptif adalah representasi objektif terhadap fenomena tertentu yang ditangkap seperti apa adanya, tanpa memasukkan pendapat pribadi (subjektif), tanpa pertimbangan nilai, tanpa klaim pendapat, yang bersifat sebagai pemecahan masalah pada masa sekarang (Abdullah, 2018 : 2). Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian tanpa adanya perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (tabraniza, 2016).

1.7.2 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilaksanakan. Penetapan lokasi penelitian dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, karena objek dan tujuan penelitian sudah ditetapkan. Dalam memperoleh data dalam

penelitian ini, penulis menetapkan lokasi penelitian di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana penulis melihat keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam proses penelitian. Situs penelitian pada penelitian ini yaitu Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

1.7.3 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pihak yang dimintai keterangan tentang suatu fakta atau pendapat yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini dengan judul “Peran *Sabet* Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Prambatan Kidul pada Pilkades Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2019” memiliki subjek penelitian yang terdiri atas sabet itu sendiri, Kepala Desa terpilih, serta masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkades.

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data mengarah pada pengertian tentang data seperti apa yang dikumpulkan pada saat proses penelitian. Jenis data pada penelitian ini berupa :

1. Wawancara, yaitu pertanyaan terbuka dan teliti tentang hasil mendalam tentang pengalaman, persepsi, pendapat, dan perasaan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada sabet yang berperan dalam Pilkades, Kepala Desa terpilih, serta masyarakat desa Prambatan Kidul yang berpartisipasi memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Desa.

2. Observasi dilakukan dengan pengamatan pada saat hari pemilihan Kepala Desa, dan beberapa hari sebelum pemilihan Kepala Desa digelar.
3. Studi kepustakaan, yang berasal dari jurnal, buku, media online yang ada kaitannya dengan topik penelitian ini.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena itu diperlukan keterampilan dari seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada narasumber menggunakan *interview guide* yang kemudian pertanyaan akan dikembangkan, sehingga dapat terjadi wawancara yang interaktif antara pewawancara dengan narasumber. Teknik pengumpulan data kedua adalah observasi. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang menjadi topik penelitian (Supardi, 2006 : 88). Observasi yang dilakukan berupa observasi partisipan, dimana penulis terlibat langsung dalam situasi yang menjadi sumber data. Selain teknik wawancara dan observasi, penulis juga menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan cara membaca literatur-literatur, jurnal, skripsi, maupun tesis yang berhubungan dengan topik penelitian penulis.

1.7.6 Analisis Data

Penelitian ini memiliki jenis penelitian deskriptif kualitatif, sehingga untuk menganalisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman hubungan yang kompleks dan mencoba membangun pemahaman melalui deskripsi. Data yang dikumpulkan selama proses penelitian baru dapat digunakan setelah data tersebut diolah dan dianalisis, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari analisis sejumlah data yang telah dikumpulkan tersebut adalah untuk menginterpretasikan data penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan. Analisis data penelitian deskriptif kualitatif dimulai dengan pengelompokan data yang sama, yang dilanjutkan dengan menginterpretasi data untuk memberi makna setiap subaspek serta hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dilakukan analisis terhadap keseluruhan aspek yang menjadi fokus penelitian untuk memahami makna hubungan antara satu aspek dengan yang lainnya. Makna hubungan tersebut selanjutnya diinterpretasikan dengan menganalisis data dari sudut pandang informan dimana penelitian dilakukan (Firman, 2018 : 2). Kemudian peneliti membuat interpretasi data dan menarik kesimpulan.

1.7.7 Kualitas Data

Penelitian kualitatif mengumpulkan data secara sistematis, kemudian mengurutkan berdasarkan suatu kategori, mendeskripsikan kemudian menginterpretasikan data yang diperoleh (uin malang, 2020). Kualitas data

penelitian memiliki kaitan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Sedangkan untuk kualitas pengumpulan data berhubungan dengan ketepatan cara-cara dalam mengumpulkan data. Dalam menguji validitas data dalam penelitian ini digunakan triangulasi, dimana triangulasi merupakan usaha untuk mengecek kebenaran data penelitian yang diperoleh dengan cara mengurangi bias pada saat proses pengumpulan dan analisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi. Menangkap fenomena tunggal dari berbagai sudut pandang akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal (Rahardjo Mudjia, 2010).